

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung

¹Ivan Mahardika Ramadan, ²Anita Kusuma Dewi, ³Henry Kurniawan

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Lampung

*Corresponding Author e-mail: namacorespondingauthor@email.com

Received: December 2025; Revised: January 2026; Published: February 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan cakupan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung selama periode 2020-2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda setelah model memenuhi uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Secara parsial, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sementara Pajak Air Permukaan juga menunjukkan pengaruh meskipun dengan kontribusi yang relatif lebih kecil. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan pajak daerah sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Secara praktis, pemerintah daerah disarankan meningkatkan pengawasan dan pelayanan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, sehingga kontribusi pajak daerah dapat lebih maksimal.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan

The Effect of Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Title Transfer Fee, and Surface Water Tax on Regional Original Revenue of Lampung Province

Abstract

This study aims to analyze the effect of Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Title Transfer Fee, and Surface Water Tax on the Regional Original Revenue of Lampung Province. The research employs a quantitative approach with a causal associative design. Secondary data were obtained from the Regional Revenue Agency of Lampung Province, covering all regencies and cities in Lampung Province during the period 2020-2023. A saturated sampling technique was applied, in which all members of the population were included as research samples. Data analysis was conducted using multiple linear regression after the regression model satisfied the classical assumption tests. The study results indicate that Vehicle Tax, Vehicle Ownership Transfer Fee, and Surface Water Tax simultaneously have no significant effect on the Original Local Revenue of Lampung Province. Partially, Vehicle Tax and Vehicle Ownership Transfer Fee have a significant effect on the Original Local Revenue, while Surface Water Tax also shows an effect, albeit with a relatively smaller contribution. These findings emphasize the importance of optimizing local tax management as an effort to strengthen fiscal capacity and financial independence of the region. In practice, the regional government is advised to enhance supervision and services in the collection of Vehicle Tax and Vehicle Ownership Transfer Fee, as well as to utilize digital technology to increase public compliance, thereby maximizing the contribution of local taxes.

Keywords: Regional Original Revenue, Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Title Transfer Fee, Surface Water Tax

How to Cite: Ramadan, I. M., Dewi, A. K., & Kurniawan, H. (n.d.). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. *Journal of Authentic Research*, 397-410. <https://doi.org/10.36312/wvawva49>



<https://doi.org/10.36312/wvawva49>

Copyright© 2026, Ramadan et al.

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan urusan pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (UU No. 1 Tahun 2022).

Daerah memiliki hak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah dituntut menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (UU No. 1 Tahun 2022). Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi strategis di Pulau Sumatera, memiliki potensi besar dalam menggali sumber-sumber PAD terutama dari sektor perpajakan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai urusan APBD atau belanja daerah. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 1 Nomor 9, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibedakan menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan.

Pajak Kendaraan Bermotor bagi penerimaan daerah dinilai cukup tinggi, hal ini disebabkan karena hampir semua masyarakat membutuhkan dan memiliki kendaraan bermotor maka itu akan berdampak pada penerimaan pendapatan asli daerah. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 1 Nomor 16, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Besaran tarif Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 6 Nomor 1 sebagai berikut: untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor pertama, ditetapkan sebesar 1% (satu persen), untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor progresif kedua, ditetapkan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen), untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor progresif ketiga, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen), untuk kepemilikan dan/atau

penguasaan kendaraan bermotor progresif keempat, ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen), untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor progresif kelima dan seterusnya, ditetapkan sebesar 2% (dua persen), untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga bersumber dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas kendaraan bermotor, yang dimaksud adalah kendaraan bermotor wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, wajib pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Tarif BBNKB atas penyerahan pertama kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih, roda 3 (tiga) dan roda 2 (dua) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024.

Sumber Pendapatan Asli Daerah juga berasal dari Pajak Air Permukaan (PAP) termasuk ke dalam pajak daerah, Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Objek PAP adalah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan pemanfaatan untuk: keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, keperluan keagamaan, kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan atau di daratan (air payau), dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek PAP adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Wajib PAP adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Pangesti (2020) tentang pengaruh PKB, BBNKB, dan PAP terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa PKB dan BBNKB berpengaruh signifikan, sedangkan PAP tidak berpengaruh. Sementara penelitian Mahendra dkk. (2022) di Provinsi Sumatera Selatan menemukan bahwa BBNKB dan PAP berpengaruh, sedangkan PKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok tidak berpengaruh. Hasil dari berbagai penelitian ini menunjukkan adanya research gap, karena belum ada konsistensi temuan akibat perbedaan wilayah dan periode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan meneliti pengaruh PKB, BBNKB, dan PAP terhadap PAD secara spesifik di Provinsi Lampung selama periode 2020–2023, sehingga diharapkan memberikan gambaran yang lebih representatif dan relevan bagi kebijakan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengumpulan data menggunakan data sekunder, dengan populasi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebanyak 15 entitas selama periode 2020–2023. Penentuan sampel menggunakan metode sampel jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Mengacu pada hal yang diuraikan dan masalah pada latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Periode 2020–2023)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Secara parsial, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sementara Pajak Air Permukaan juga menunjukkan pengaruh meskipun dengan kontribusi yang relatif lebih kecil. Temuan ini menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan pajak daerah sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Secara praktis, pemerintah daerah disarankan meningkatkan pengawasan dan pelayanan dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, sehingga kontribusi pajak daerah dapat lebih maksimal.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menguji pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang digunakan berbentuk angka dan dianalisis menggunakan metode statistik guna memperoleh kesimpulan yang bersifat objektif dan terukur.

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 45, Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Objek penelitian difokuskan pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan dan pencatatan penerimaan pajak daerah tingkat provinsi.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung yang berjumlah 15 daerah. Setiap kabupaten dan kota memiliki unit kerja yang mengelola pendapatan daerah sehingga dianggap relevan untuk menggambarkan kondisi Pendapatan Asli Daerah secara menyeluruh di tingkat provinsi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Dengan teknik ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif terkait pengaruh variabel pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung periode 2020–2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan mencatat dan mengumpulkan data terkait Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan yang telah tersedia dalam laporan resmi instansi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 25. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi, uji simultan (uji F), dan uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif membantu memahami pola umum, sebaran data, serta kecenderungan nilai dari masing-masing variabel penelitian sebelum dilakukan pengujian lanjutan. Variabel yang dianalisis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung selama periode 2020–2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dihimpun dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sehingga mampu merepresentasikan kondisi pendapatan daerah secara menyeluruh pada tingkat provinsi.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1 (PKB)	47	5679019517	97609650042	37928468258.47	24476464828.247
X2 (BBNKB)	47	5573137000	89371343095	29773273775.43	21619903927.900
X3 (PAP)	47	0	742074159	126002772.45	171726305.911
Y (PAD)	47	27813379280	347290190268	125748416258.68	86343933459.241
Valid N (listwise)	47				

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, Pendapatan Asli Daerah menunjukkan variasi nilai yang cukup lebar antara nilai minimum dan maksimum, yang

mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal antar daerah di Provinsi Lampung. Nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah menggambarkan besarnya kontribusi penerimaan daerah secara umum selama periode pengamatan, sementara nilai standar deviasi menunjukkan adanya fluktuasi penerimaan yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan kebijakan daerah pada masing-masing tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak bersifat homogen antar wilayah, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik dan potensi ekonomi daerah masing-masing.

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki nilai rata-rata yang relatif tinggi dibandingkan variabel pajak daerah lainnya, yang mengindikasikan bahwa jenis pajak ini merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Rentang nilai minimum dan maksimum Pajak Kendaraan Bermotor juga menunjukkan adanya perbedaan tingkat kepemilikan dan aktivitas kendaraan bermotor antar kabupaten dan kota. Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memperlihatkan variasi yang cukup signifikan, yang mencerminkan intensitas transaksi kendaraan bermotor di masing-masing daerah. Pajak Air Permukaan memiliki nilai rata-rata yang lebih kecil dibandingkan dua jenis pajak lainnya, namun tetap menunjukkan kontribusi yang konsisten terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi persyaratan statistik sehingga hasil analisis dapat diinterpretasikan secara valid. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah data penelitian terbebas dari permasalahan normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Pemenuhan asumsi klasik menjadi prasyarat penting sebelum dilakukan pengujian regresi dan hipotesis, agar hubungan antara variabel independen dan variabel dependen tidak menghasilkan estimasi yang bias.

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		47
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	55143.44144112
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.062
	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi setelah penyesuaian data berada di atas batas yang ditentukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian terdistribusi secara normal. Kondisi ini menandakan bahwa residual dalam model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis

lanjutan. Dengan terpenuhinya asumsi ini, model regresi mampu merepresentasikan hubungan antar variabel secara lebih akurat.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance		VIF
1	X1 (PKB)	.144	6.959
	LN_X2 (BBNKB)	.124	8.067
	X3 (PAP)	.648	1.544

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance di atas batas minimum dan nilai Variance Inflation Factor berada di bawah batas maksimum yang diperkenankan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen dalam model penelitian. Dengan demikian, masing-masing variabel Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan dapat menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah secara independen tanpa saling mempengaruhi secara berlebihan.

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error		Beta		
1	(Constant)	-.954	1.048		-.911	.369
	LN_X1	.153	.157	.588	.974	.337
	LN_X2	-.086	.152	-.363	-.563	.577
	LN_X3	-.028	.021	-.271	-1.329	.193

a. Dependent Variable: ABS_RES

Hasil pengujian heterokedastisitas menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heterokedastisitas. Pola sebaran residual tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak, yang mengindikasikan bahwa varians residual bersifat konstan. Kondisi ini memperkuat kelayakan model regresi untuk digunakan dalam analisis hubungan antar variabel penelitian.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.618 ^a	.382	.368	43628.74488412	1.848

a. Predictors: (Constant), Lag_Res1
b. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Uji autokorelasi menggunakan metode Durbin Watson menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh berada pada rentang yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi, baik positif maupun negatif. Hal ini berarti residual pada satu periode

tidak berkorelasi dengan residual pada periode lainnya. Dengan terpenuhinya asumsi ini, model regresi yang digunakan dalam penelitian dapat dinyatakan memenuhi seluruh asumsi klasik dan layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis regresi linier berganda.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Model regresi ini disusun setelah seluruh asumsi klasik terpenuhi, sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara statistik. Analisis ini bertujuan untuk melihat arah hubungan, besarnya pengaruh masing-masing variabel independen, serta kemampuan model dalam menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah selama periode penelitian.

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29129.391	26707.110		1.091	.281
	(PKB) X1	1.592	.430	.851	3.701	.001
	(BBNKB) X2	.267	.522	.133	.512	.611
	(PAP)_X3	-3.639	1.653	-.228	-2.201	.033

a. Dependent Variable: SORT_Y

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Koefisien regresi pada masing-masing variabel menunjukkan arah pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki koefisien bernilai positif, yang menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut cenderung diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, koefisien Pajak Air Permukaan mencerminkan besarnya kontribusi variabel tersebut terhadap perubahan Pendapatan Asli Daerah dalam model penelitian.

Tabel 7. Koefisien Determinasi Masukkan

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.880 ^a	.774	.758	57034.62028

a. Predictors: (Constant), SQRT_X3, SQRT_X1, SQRT_X2
b. Dependent Variable: SQRT_Y

Nilai koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan dalam menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah. Nilai ini menggambarkan proporsi perubahan Pendapatan Asli Daerah yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen secara bersama-sama, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa

model regresi yang digunakan memiliki tingkat penjelasan yang cukup terhadap variasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung selama periode 2020–2023.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung, baik secara simultan maupun secara parsial. Pengujian ini bertujuan untuk memberikan dasar pengambilan keputusan atas hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda.

Tabel 8. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	478542693330.001	3	159514231110.000	49.037	.000 ^b
	Residual	139876760162.651	43	3252947910.759		
	Total	618419453492.653	46			
a. Dependent Variable: SQRT_Y						
b. Predictors: (Constant), SORT X3, SORT X1, SORT X2						

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Nilai signifikansi uji F berada di bawah tingkat signifikansi yang ditetapkan, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh simultan ketiga variabel independen terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerimaan dari berbagai jenis pajak daerah memiliki keterkaitan yang erat dalam membentuk struktur Pendapatan Asli Daerah di tingkat provinsi.

Tabel 9. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	29129.391	26707.110		.281
	(PKB)_X1	1.592	.430	.851	.001
	(BBNKB)_X2	.267	.522	.133	.611
	(PAP)_X3	-3.639	1.653	-.228	.033
a. Dependent Variable: SQRT_Y					

Berdasarkan hasil uji parsial, Pajak Kendaraan Bermotor terbukti berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berkontribusi langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga menunjukkan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang mencerminkan peran penting aktivitas transaksi kendaraan bermotor dalam mendukung penerimaan daerah. Sementara itu, hasil uji parsial terhadap Pajak Air Permukaan menunjukkan adanya pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang menandakan bahwa pemanfaatan sumber daya air permukaan turut memberikan

kontribusi terhadap pendapatan daerah meskipun dengan besaran yang berbeda dibandingkan jenis pajak lainnya.

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peran nyata dalam membentuk struktur pendapatan daerah. Kondisi tersebut sejalan dengan karakteristik Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu jenis pajak daerah dengan basis pajak yang luas, mengingat kepemilikan kendaraan bermotor hampir merata di seluruh lapisan masyarakat dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.

Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah juga dapat dipahami dari stabilitas penerimaannya yang relatif konsisten dari tahun ke tahun. Pajak ini dipungut secara periodik dan bersifat wajib, sehingga menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan operasional, turut mendorong peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang pada akhirnya berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki implikasi langsung terhadap kapasitas fiskal daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Pangesti (2020) yang menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Agustiningasih dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kesamaan hasil tersebut memperkuat argumentasi bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung kemandirian keuangan daerah, khususnya di wilayah dengan tingkat kepemilikan kendaraan yang tinggi.

Dalam konteks Provinsi Lampung, hasil ini mencerminkan bahwa optimalisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, pembaruan data kendaraan, serta penguatan sistem administrasi perpajakan daerah berpotensi memperbesar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan daerah. Dengan demikian, Pajak Kendaraan Bermotor tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan rutin, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Temuan ini mengindikasikan bahwa aktivitas peralihan kepemilikan kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk penerimaan daerah. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipungut pada saat terjadi transaksi kendaraan, sehingga penerimaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika jual beli kendaraan bermotor di masyarakat.

Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dipahami dari sifat pajak ini yang dikenakan atas setiap penyerahan

hak kepemilikan kendaraan bermotor, baik melalui jual beli, hibah, maupun warisan. Setiap transaksi tersebut secara langsung menambah penerimaan daerah tanpa bergantung pada periode waktu tertentu seperti halnya Pajak Kendaraan Bermotor yang bersifat tahunan. Dengan demikian, meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat cenderung mendorong peningkatan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Mahendra dkk. (2022) yang menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Hanifah dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan sumber penerimaan daerah yang sensitif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan perkembangan sektor transportasi.

Dalam konteks Provinsi Lampung, pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah mencerminkan peran penting transaksi kendaraan bermotor dalam mendukung keuangan daerah. Optimalisasi pelayanan administrasi kendaraan, kemudahan proses balik nama, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak berpotensi memperbesar kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan tambahan, tetapi juga mencerminkan dinamika ekonomi daerah yang terus berkembang.

Pengaruh Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Air Permukaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan air permukaan sebagai objek pajak memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan daerah, meskipun nilainya relatif lebih kecil dibandingkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Air Permukaan tetap memiliki peran dalam memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah, terutama di daerah yang memiliki aktivitas pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan industri dan komersial.

Pengaruh Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dipahami dari karakteristik Provinsi Lampung yang memiliki sumber daya air permukaan yang cukup beragam, baik berupa sungai, waduk, maupun sumber air lainnya yang dimanfaatkan oleh berbagai sektor usaha. Pemungutan Pajak Air Permukaan atas aktivitas tersebut memberikan tambahan penerimaan bagi pemerintah daerah yang bersifat spesifik dan berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam. Meskipun kontribusinya tidak sebesar jenis pajak daerah lainnya, Pajak Air Permukaan tetap berperan sebagai sumber pendapatan yang melengkapi penerimaan daerah secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Delima dkk. (2022) serta Nurlela dan Hernawati (2023) yang menyatakan bahwa Pajak Air Permukaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kesamaan hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya air permukaan, apabila dikelola dan dipungut secara optimal, mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi keuangan daerah. Temuan tersebut juga memperkuat pandangan bahwa Pajak Air Permukaan memiliki potensi

untuk terus dikembangkan seiring dengan meningkatnya kebutuhan air bagi kegiatan ekonomi.

Dalam konteks Provinsi Lampung, pengaruh Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah mencerminkan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dengan kebijakan perpajakan daerah. Pengawasan terhadap pemanfaatan air permukaan, akurasi pengukuran volume penggunaan, serta kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang dapat mempengaruhi besarnya penerimaan dari Pajak Air Permukaan. Dengan pengelolaan yang tepat, Pajak Air Permukaan dapat menjadi salah satu instrumen pendukung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara individual. Secara simultan, ketiga jenis pajak tersebut memiliki pengaruh terhadap PAD Provinsi Lampung. Temuan ini menunjukkan pentingnya optimalisasi pengelolaan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan dan mendukung kemandirian fiskal daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung disarankan untuk memperkuat sistem pelayanan dan pengawasan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta mengembangkan inovasi kebijakan untuk meningkatkan kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui perbaikan pendataan, pemanfaatan teknologi digital, dan insentif bagi masyarakat. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain seperti Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah serta memperluas periode penelitian agar hasilnya lebih komprehensif. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah, yang secara langsung mendukung peningkatan fasilitas publik dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, A., dan Perdanawati, S. L. (2024). Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Daerah Di Uppd Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(1), 27-35.
- Anasta, L., dan Nengsih, N. (2019). Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat). *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 12(1), 50-55.
- Aprianto, A., Debataraja, N. N., & Imro'ah, N. (2020). Metode Cochran-Orcutt untuk Mengatasi Autokorelasi pada Estimasi Parameter Ordinary Least Squares. *Bimaster: Buletin Ilmiah Matematika, Statistika Dan Terapannya*, 9(1).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, diakses dari <https://lampung.bps.go.id/id>
- Bougie, dan Sekaran. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darma, B. 2021. *Statistika penelitian menggunakan SPSS (Uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier sederhana, regresi linier berganda, uji t, uji F, R²)*. Guepedia.

- Delima, P., Rismansyah, R., dan Nurmala, N. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(2), 248-262.
- Fuji, F. N., dan Hernawati, E. (2023). Pengaruh Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatanasli Daerah Dibapenda Kabupaten Sukabumi Periode 2018-2022. *JEBS (Journal of Economic and Business Student)*, 2(2), 73-80.
- Ghozali, I. 2018. Ghozali 2018. In Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hanifah, N., Nurmilah, R., dan Tanjung, H. (2023). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Uptd Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (PPPDW) Kota Sukabumi.
- Julieniza, N. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2022 (Doctoral Dissertation, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang).
- Lupiyoadi, R., dan Ikhsan, R. B. (2015). Praktikum metode riset bisnis. *Jakarta: Salemba Empat*, 306.
- Mahendra, C. I., Masnila, N., dan Dwitayanti, Y. (2022). Pengaruh Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Provinsi Sumatera Selatan. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 6(2), 97-106.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Terbaru). Andi Offset.
- Nugraha, D. P. D. (2022). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Pangesti, N. A. (2020). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Dan Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4. Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, diakses dari <https://perpajakan.ddtc.co.id/publikasi/tax-manual>
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D. ALFABETA.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D (Sutopoan, Ed.; Edisi 1). ALFABETA BANDUNG.
- Suharyadi dan Purwanto. 2015. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18, diakses dari https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Widya, R. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) Dan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) Dealer Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan. *KINDAI*, 16(3), 516-522.
- Wijoyo, D. I. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Pajak Air Permukaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi Periode 2018-2021. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(3), 52-58.